

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Bujet Honor Tenaga Kontrak Membengkak

Entitas / Cakupan : Kota Bekasi

Sumber / Hal : Media Indonesia / Hal.16

Edisi : Kamis, 13 Juli 2018

Bujet Honor Tenaga Kontrak Membengkak

ANGGARAN atau bujet honor bagi tenaga kerja kontrak (TKK) di Kota Bekasi tahun ini mencapai Rp700 miliar. Angka itu naik hampir 100% dari tahun lalu yang hanya Rp390 miliar.

"Jumlah TKK pada 2018 memang bertambah. Jadi, anggarannya bertambah juga," ungkap Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi, Dadang Hidayat, kemarin.

Dana Rp700 miliar tersebut dialokasikan untuk menggaji sekitar 10 ribu TKK, yang be-

kerja di lingkup Pemerintahan Kota Bekasi. Sementara itu, pada 2017 anggaran honor TKK mencapai Rp390 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk menggaji 5.151 TKK.

Sebagian besar pegawai berstatus TKK bernaung di bawah dinas pendidikan. Jumlahnya melonjak lantaran adanya tambahan dari pengangkatan guru berstatus honorer menjadi guru kontrak. "Tahun lalu mereka sudah diangkat jadi guru kontrak sehingga haknya sama dengan pegawai kontrak lainnya," kata Dadang.

Meski demikian, Dadang menampilkan anggaran honor TKK memberatkan kas daerah karena pemerintah daerah tetap mencari sumber pemasukan kas daerah, seperti dana perimbangan dari pajak kendaraan dan parkir. Potensi pendapatan daerah dari dua *item* itu sangat besar.

Namun, ia mengaku ada risiko yang akan diambil bila anggaran belanja tidak langsung itu berjumlah besar. Salah satunya memangkas kegiatan pembangunan infrastruktur.

"Tahun ini memang lebih

banyak kegiatan pemeliharaan untuk pembangunan hanya meneruskan program sebelumnya," tandas dia.

Besarnya anggaran pegawai ini membuat Direktur Center of Budget Analysis Ucok Sky Khadafi khawatir. Secara khusus dia meminta sebaiknya lembaga hukum tindak pidana korupsi harus mengawasi penggunaan anggaran honor pegawai TKK di Kota Bekasi. Sebabnya, besaran lonjakan anggaran dirasa sangat besar. "Untuk jenis anggaran belanja langsung, nilainya memang sangat fantastis. Penga-

wasan harus diperketat. Jangan sampai menjadi celah penyalahgunaan anggaran tersebut," ungkap Ucok, kemarin.

Menurut Ucok, anggaran besar untuk belanja pegawai harus punya penjelasan yang konkret. Pasalnya, yang merasakan dampak pengurangan kegiatan belanja tak langsung atau pembangunan daerah ialah masyarakat. "Pembangunan bisa tertunda karena masalah ini sebab banyak kegiatan yang akan dipangkas demi menutupi pengeluaran ini," tandas dia. (Gan/J-3)